

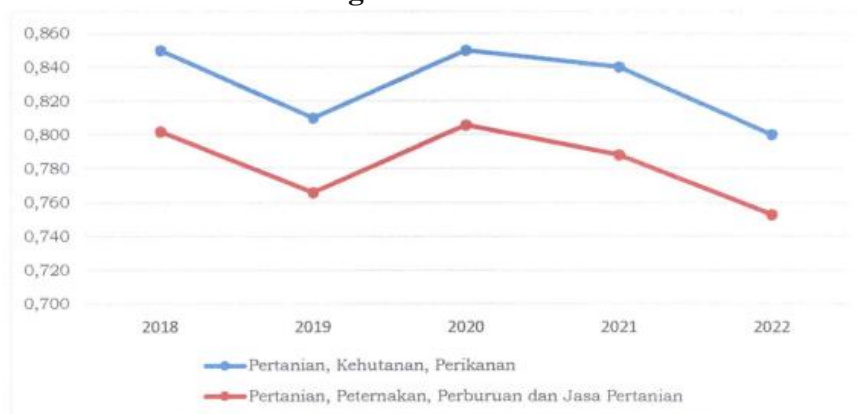
# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian mencakup atas sub sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui sektor pertanian sesuai dengan strategi SDGs yaitu mengkhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, serta merencanakan pertanian berkelanjutan (FAO, 2015). Perkotaan merupakan pusat dari budaya, kreativitas, maupun lambang dari perkembangan sosial dan ekonomi. Perkotaan besar yang mempunyai beberapa wilayah administratif ditinjau dari luas wilayah dan jumlah penduduk disebut sebagai kota metropolitan. Kota Semarang termasuk kota metropolitan yang jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.659.975 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk di Kota Semarang berjumlah 4.441 jiwa (BPS Kota Semarang, 2022).

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Pada PDRB Kota Semarang**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2022)

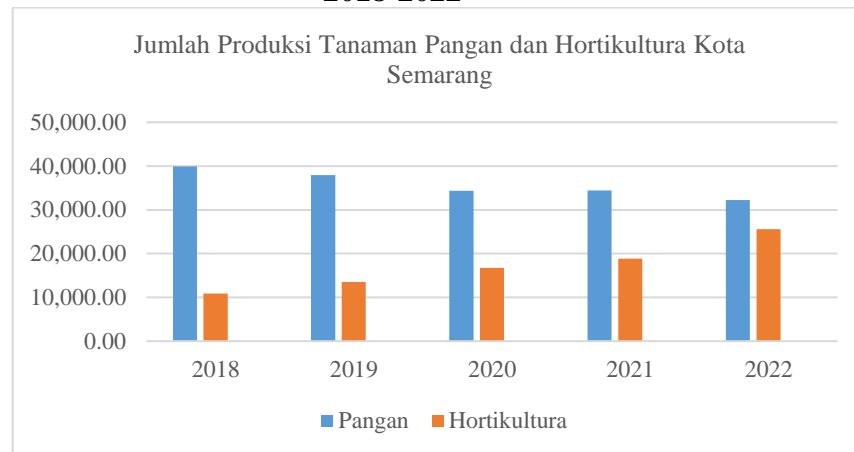
Jumlah penduduk Kota Semarang yang meningkat tidak sejalan dengan kontribusi sektor pertanian dalam struktur ekonomi Kota Semarang yang kecil dan cenderung menurun sejak tahun 2018. Kontribusi sektor pertanian pada PDRB Kota Semarang tahun 2022 tidak mencapai 100% yaitu 95,12%, yang menurun dari tahun 2021 sebesar 4,44%. Ketidaktercapaian indikator karena pertumbuhan sektor lain yang lebih tinggi pasca Pandemi Covid-19 dibandingkan sektor pertanian, seperti sektor industri dan pengolahan.

Pertambahan jumlah penduduk yang terjadi setiap tahunnya memerlukan jumlah konsumsi pangan yang semakin besar, sedangkan di sisi lain terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian untuk memenuhi permintaan lahan kegiatan pembangunan di masyarakat. Menurut RPJMD Perubahan Kota Semarang Tahun 2016-2021 menyebutkan lahan terbangun di kota Semarang bertambah hingga 742,5 Ha/tahun, bahkan persentase penggunaan lahan terbangun pada beberapa kecamatan mencapai >90%. Kondisi menurunnya lahan pertanian dengan meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat berpotensi memunculkan permasalahan ketahanan pangan di masyarakat dan kasus stunting.

Ketersediaan lahan pertanian di Kota Semarang tahun 2021 sebesar 6,41% dari total luas wilayah Kota Semarang. Luasan lahan pertanian sebesar 23,96 km<sup>2</sup> untuk produksi total hanya dapat memenuhi 11% kebutuhan pangan masyarakat Kota Semarang, sedangkan sisanya 89% didatangkan dari luar Kota Semarang. Keterbatasan lahan pertanian membuat kebutuhan pertanian atau pemenuhan pasokan hasil pertanian sangat bergantung pada wilayah penyangga Kota Semarang yaitu Ungaran, Kendal, Demak, dan Grobogan (diakses pada

<https://www.ayosemarang.com/semarang-raja/pr-771547609/ketersediaan-lahan-pertanian-kota-semarang-tinggal-6-persen-dispartan-dorong-urban-farming>).

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Semarang Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang (2022)

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui jumlah produksi tanaman hortikultura mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan pada produksi tanaman pangan di Kota Semarang. Pada tahun 2021 produksi tanaman pangan sebesar 34.417,30 ton kemudian tahun 2022 menurun menjadi 32.237,84 ton atau mengalami minus 6,33%. Jumlah produksi tanaman pangan juga tidak mencapai target kinerja program yang telah ditetapkan Dinas Pertanian Kota Semarang, yang pada tahun 2021 target sebesar kinerja program sebesar 45.276 ton tetapi hasil produksi hanya 34.417,30 ton atau selisih yang tidak tercapai sebesar 10.858,7 ton.

Penurunan ketersediaan lahan pertanian menyebabkan rendahnya produksi pertanian di Kota Semarang khususnya pada sektor tanaman pangan, serta ketergantungan pemenuhan pangan pada wilayah sekitar Semarang, mendorong

Dinas Pertanian Kota Semarang untuk mengencangkan program *urban farming* atau pertanian perkotaan.

*Urban farming* atau pertanian perkotaan adalah aktivitas penggunaan ruang-ruang terbuka yang tidak produktif menjadi lahan pertanian atau perkebunan yang produktif agar menjadi aktivitas alternatif masyarakat perkotaan dalam mengembangkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (Luthan dkk, 2019). Kegiatan pertanian dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan tidak selalu melalui pola konvensional yang memerlukan lahan luas. Pertanian dapat dilakukan adaptif dengan ketersediaan lahan dan kehidupan masyarakat perkotaan.

Pertanian perkotaan sebagai komponen utama pembangunan sistem pangan berkelanjutan, dan apabila dilakukan perencanaan yang tepat dapat mengatasi masalah kerawanan pangan (Haletky & Taylor, 2006). Pertanian perkotaan dapat dilaksanakan pada kota (intra-urban) serta daerah pinggiran (periurban), yang berfokus pada skala mikro (individual/keluarga) dan usaha kecil menengah, tetapi juga masih terdapat dalam skala besar (skala nasional atau internasional) (Fauzi, Ichniarsyah and Agustin, 2016).

*Urban Farming* telah menjadi praktik umum dengan cara bervariasi di berbagai kota antar negara. Pada studi kasus di Boston, Amerika Serikat memenuhi pedoman gizi nasional untuk asupan sayuran, yang mendapatkan sekitar \$160 juta pendapatan AS bagi para petani kota, serta bertindak menjadi sarana pengembangan masyarakat pedagogis, meskipun tergantung pada proliferasi pertanian perkotaan dalam lingkup yang luas (Goldstein et al., 2017). Studi kasus penerapan *urban*

*farming* di Asia Tenggara seperti Malaysia telah berperan untuk ketahanan pangan melalui penyediaan akses pada penduduk kota dalam makanan bergizi, aman, serta hemat biaya (Rezai et al., 2016).

Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung pengelolaan *urban farming* di Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang. Sasaran gerakan pembudayaan pertanian perkotaan yaitu masyarakat umum, pemerintah, dan non pemerintah. Gerakan pembudayaan pertanian perkotaan di Kota Semarang meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan konsultasi.

Pengelolaan pertanian perkotaan di Kota Semarang masih mengalami permasalahan seperti keanggotaan dalam kelompok tani. Minat masyarakat untuk bergabung kelompok tani perkotaan yang mendukung pelaksanaan *urban farming* masih rendah. Pembentukan kelompok tani tersebut juga belum dapat meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan pertanian perkotaan. Minat kegiatan *urban farming* yang masih rendah membuat hasil kegiatan yang dilaksanakan belum sebanding dengan modal produksi. “*Kami mencoba mendorong masyarakat agar terbentuk kelompok pertanian perkotaan, tetapi minat masih rendah dan belum fokus, sehingga kader yang dibina ternyata sama dengan kader kesehatan atau kader KB. Hasil dari yang mereka upayakan sebagian besar masih belum sepadan dengan ongkos biaya produksi.* (diakses dari <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/271470/kampanyekan-urban-farming-dinas-pertanian-kota-semarang-distribusikan-bibit>).

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Kelompok Tani di Kota Semarang Tahun 2017-2020**

No.	Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Jumlah Kelompok Tani	371 Kelompok	382 Kelompok	384 Kelompok	389 Kelompok
2.	Jumlah Anggota	9.603 Petani	9.679 Petani	9.533 Petani	10.285 Petani
3.	Jumlah Kecamatan	16 Kec.	16 Kec.	16 Kec.	16 Kec.
4.	Jumlah Kelurahan	113 Kel.	125 Kel.	133 Kel.	138 Kel.

Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang (2021)

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah anggota petani di Kota Semarang pada tahun tahun 2018 sebesar 9.679 kemudian jumlahnya menurun pada tahun 2019 menjadi 9.533 Petani, dan pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 10.285 Petani. Permasalahan lainnya adalah minimnya pengetahuan masyarakat Kota Semarang mengenai kegiatan pertanian perkotaan, sebab pekerjaan masyarakat Kota Semarang sebagian besar tidak berhubungan dengan pertanian. Pada RPJMD tahun 2021-2026 jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan sebagai tenaga penggerak untuk memberikan pendampingan pertanian di masyarakat belum mencapai target. Kondisi awal jumlah PPL tahun 2019 adalah 29 PPL kemudian tahun 2020 jumlahnya berkurang menjadi 27 PPL.

*Urban farming* dengan sasarannya adalah masyarakat luas untuk melakukan kegiatan pertanian perkotaan yang melibatkan berbagai *stakeholders* sehingga perlu melihat peran *stakeholders* dalam pengelolaan kegiatan. Peran *stakeholders* pada pengelolaan *urban farming* sebagai komponen penting untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Kehadiran *stakeholders* memiliki peran yang heterogen dalam program *urban farming*. Heterogenitas ditinjau dari pelaksanaan perbedaan tugas dan fungsi setiap *stakeholders* dalam satu tujuan, yang mencakup negosiasi-negosiasi yang menghasilkan kesepakatan pembagian peran pemangku

kepentingan. Peran *stakeholders* yang optimal dalam pengelolaan sebuah program atau kegiatan dapat menciptakan tanggung jawab diantara *stakeholders* dan mengupayakan keberlanjutan program.

Salah satu Kelurahan di Kota Semarang yang melaksanakan *urban farming* adalah Kelurahan Sampangan. Kelurahan Sampangan ditinjau pada aspek geografisnya tidak mempunyai potensi lahan sawah atau ladang dan merupakan kawasan padat permukiman, sehingga dalam mendorong potensi sektor pertanian dengan mengoptimalkan kegiatan pertanian perkotaan. Setiap *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan memiliki peranan masing-masing dalam mencapai tujuan kegiatan.

Peran *stakeholders* pada pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan Kota Semarang mengalami permasalahan. Pertama, kurangnya partisipasi wanita usia muda dalam keanggotaan Kelompok Wanita Tani Puspitasari Kelurahan Sampangan. Kelompok Wanita Tani Puspitasari yang mendorong ibu-ibu Kelurahan Sampangan melakukan proses *urban farming* untuk dipanen dan diperjualbelikan, yang mana keanggotaan KWT didominasi oleh wanita usia lanjut. Keberhasilan pengelolaan *urban farming* ditentukan dari partisipasi masyarakat, sebab masyarakat akan terjun langsung sebagai implementor di wilayahnya. Kurangnya partisipasi wanita usia muda menunjukkan belum adanya regenerasi yang baik, sehingga memberikan masalah dalam keberlanjutan. “*Karena telah terbentuk, jadi harus terus dilanjutkan. Kalau bisa terdapat regenerasi, sehingga dapat bertahan*” (diakses dari

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2023/02/02/kwt-puspitasari-sampangan-ubah-lahan-buangan-jadi-urban-farming/2/>).

Kedua, berdasarkan observasi awal pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan menurut Penyuluh Pertanian Lapangan Gajahmungkur terjadi masalah koordinasi tugas Kelompok Wanita Tani dengan Penyuluh Pertanian Lapangan sehingga terjadi perbedaan pemahaman dan tindakan dalam melaksanakan kegiatan *urban farming*. Koordinasi tersebut terkait dengan pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan *urban farming*.

Ketiga, belum optimalnya peran penyuluh pertanian perkotaan sebagai motivator dalam menumbuhkan semangat dan dorongan wanita usia muda Kelurahan Sampangan untuk melaksanakan *urban farming*, yang dilihat dari kurangnya partisipasi wanita usia muda pada pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan. Kondisi tersebut didukung penelitian terdahulu dari Yestisia Inne (2021) yang menyatakan bahwa peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) pada pelaksanaan *urban farming* di Kota Semarang sebagai mediator, inisator, supervisor, dan fasilitator termasuk pada kategori tinggi, sedangkan peran PPL menjadi motivator termasuk rendah. Peran penyuluh sebagai mediator berada pada presentase 96,77%, peran penyuluh sebagai inisator sebesar 93,98%, peran supervisor sebanyak 87,52%, peran sebagai fasilitator sebesar 95,32%, serta peran yang paling rendah adalah peran penyuluh sebagai motivator hanya sebesar 59,56%.



Keempat, belum tercapainya target kerja Dinas Pertanian Kota Semarang dalam memberikan kegiatan penyuluhan dan pelatihan pertanian perkotaan. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan pertanian perkotaan bagi masyarakat Kota Semarang yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang melalui *urban farming corner* dilihat dari realisasi pelatihan *urban farming* 2021 pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah hanya mencapai 14 kali, dari target sebesar 24 kali pelatihan (Dinas Pertanian Kota Semarang, 2022).

Kelima, kurangnya sinergitas Dinas Pertanian Kota Semarang dan Penyuluh Pertanian Lapangan dengan komunitas dan masyarakat dalam mengelola *urban farming*. Keadaan tersebut dilihat dari produksi hasil *urban farming* di Kota Semarang tahun 2021 sebesar 5.841 kg. Jumlah hasil produksi *urban farming* tersebut tersebut belum menekankan pada produksi usaha hasil panen atau olahan hasil panen *urban farming*, yang mana masih memfokuskan pada skala pemenuhan kebutuhan pangan individual dan keluarga (Dinas Pertanian Kota Semarang, 2022).

Keenam, kurang variatifnya pelatihan yang diberikan oleh akademisi dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan. Universitas Negeri Semarang (UNNES) melalui kegiatan pengabdian masyarakat memberikan pelatihan pembuatan pupuk untuk mendukung pengelolaan *urban farming*. Pelatihan yang diberikan oleh akademisi sebatas pada pelatihan pembuatan pupuk, yang mana belum terdapat pelatihan dalam pemanfaatan benih tanaman dari lingkungan sekitar masyarakat. Kondisi tersebut membuat komunitas dan masyarakat belum dapat melakukan pemanfaatan benih yang terdapat di lingkungan sekitar masyarakat, sehingga sangat bergantung pada pemberian bantuan bibit tanaman dari Dinas

Pertanian Kota Semarang. "*Permintaan benih sangat luar biasa. Setiap hari ada yang minta. Ini baru pengenalan. Jadi, mereka mulai dari nol*" (diakses dari <https://www.rmoljawatengah.id/permintaan-benih-meningkat-seiring-berjalannya-program-urban-farming>).

Ketujuh, kurangnya keterlibatan pihak bisnis atau privat pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan. Pihak bisnis yang terlibat dalam pengelolaan *urban farming* hanya PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Regional Office Semarang melalui kegiatan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) untuk mendorong kelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat dalam memberikan manfaat ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Semarang menjelaskan bahwa Kecamatan Gajahmungkur mempunyai 1 kelompok pertokoan, 7 minimarket atau swalayan, 172 toko, 10 restoran. Sarana lembaga keuangan yang terdapat di Kelurahan Sampangan sebanyak 2 bank umum pemerintah, 1 bank perkreditan rakyat, 2 koperasi simpan pinjam, dan 2 koperasi lainnya (Kecamatan Gajahmungkur Dalam Angka, 2021). PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Regional Office Semarang BRI dengan program Bertani di Kota (BRInita) membangun green house dan pemberian bantuan kegiatan *urban farming* di Kelurahan Sampangan.

Kedelapan, media massa belum memberikan informasi kegiatan *urban farming* secara rutin dan belum mempublikasikan terkait penjualan hasil panen *urban farming* di Kelurahan Sampangan. Media massa menginformasikan terkait kegiatan *urban farming* belum secara berkala atau rutin di Kelurahan Sampangan, yang mana hanya mempublikasikan terkait *urban farming* ketika terdapat acara

tertentu di Kelurahan Sampangan. Informasi yang sedikit mengenai kegiatan *urban farming* membuat masyarakat belum mengetahui secara jelas pelaksanaan *urban farming*. Media massa juga belum mempublikasikan terkait penjualan hasil panen *urban farming* di Kelurahan Sampangan. *Urban farming* sebagai kegiatan pertanian dengan fokus skala mikro yaitu individu dan keluarga, serta pada usaha kecil dan menengah. Pemasaran hasil panen *urban farming* pada masyarakat Kelurahan Sampangan RW 03 baru dilakukan dengan masyarakat sekitar dan harga jual sayuran dibawah rata-rata dari harga penjualan umum sayuran hidroponik (<https://www.kompasiana.com/timkksampangan2562/61cad6189bdc40505d33c1a2/mengelilingi-sampangan>).

Keberhasilan pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang tidak hanya berasal dari satu pihak. Peran *stakeholders* yang mencakup pihak pemerintah, bisnis, komunitas, akademisi, dan media massa dibutuhkan untuk mewujudkan dan memaksimalkan pencapaian sasaran pengelolaan. Permasalahan berkaitan dengan peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan seharusnya menjadi evaluasi *stakeholders* yang terlibat, supaya semakin meningkatkan peranannya dalam pengelolaan *urban farming*. Berdasarkan uraian diatas, maka memerlukan penelitian yang dapat mengklasifikasikan peran *stakeholders* pada pengelolaan *urban farming* sehingga penelitian tentang Peran *Stakeholders* dalam Pengelolaan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*) di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang penting dilaksanakan.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan peran *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1) Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik terkait pemikiran akademis dalam menganalisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang.
2. Penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan untuk meningkatkan peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang.

## 2) Kegunaan Praktis

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan khususnya terkait peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* di Kota Semarang. Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari kegiatan pembelajaran selama proses perkuliahan.

### 2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi peran pemerintah dalam upaya gerakan pembudayaan *urban farming* di Kota Semarang dengan berkontribusi dalam hal saran atau masukan yang membangun.

### 3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan referensi penelitian bagi seluruh pihak yang melaksanakan kajian atau penelitian mengenai peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang. Penelitian ini juga memberikan masukan bagi kontribusi akademisi untuk pengelolaan *urban farming* di Kota Semarang.

### 4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan dorongan masyarakat untuk memberikan kontribusi pada pengelolaan *urban farming* sebagai upaya peningkatan kemandirian pangan dan gizi dan penciptaan lingkungan yang sehat di masyarakat.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti/Tahun/Sumber	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nurhuda Candra Hidayat; Erna Setijaningrum; Sulikah Asmorowati; 2020	Mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember	Penelitian ini menggunakan teori identifikasi stakeholder dari Overseas Development Administration (1995) yang membagi stakeholder menjadi tiga kelompok stakeholder primer, stakeholder sekunder, dan stakeholder kunci; serta menggunakan teori pemetaan stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh menurut Reed et al (2009)	Deskriptif Kualitatif	<i>Stakeholder</i> primer yaitu Pemerintah Desa Tugusari dan LMDH Wana Makmur, <i>Stakeholder</i> Sekunder yaitu UPT PHW VII Jember, <i>Stakeholder</i> kunci yaitu Perum Perhutani KPH Jember. <i>Stakeholder</i> yang menjadi <i>key players</i> adalah Perum Perhutani KPH Jember, kategori <i>Stakeholder</i> kategori <i>contest setters</i> adalah Pemerintah Desa Tugusari, kategori <i>Subjects</i> adalah LMDH Wana Makmur, serta kategori <i>Crowd</i> adalah UPT PHW VII Bondowoso wilayah kerja Jember. pengelolaan sumber daya hutan di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Jember telah berjalan dengan baik karena terdapat interelasi aktor dari <i>key player</i> yaitu Perum Perhutani KPH Jember, dan <i>subjects</i> yaitu LMDH Wana Makmur yang sangat baik.
2.	Oka Ferry Sandy; 2020	Mengidentifikasi, memetakan, serta menganalisis peran aktor pada implementasi pembangunan sanitasi di	Penelitian ini menggunakan teori peran aktor dari Thompson (dalam Wakka, 2014:51), yang dikelompokkan	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Probolinggo melibatkan 13 aktor. Aktor yang menjadi aktor kunci ( <i>key player</i> ) yaitu BAPPEDA, Dinas Perumahan Kawasan

		Kabupaten Probolinggo	menjadi Aktor dengan <i>interest</i> (tingkat kepentingan) namun <i>power</i> (kekuatan) rendah yaitu <i>subject</i> ; Aktor dengan <i>interest</i> dan <i>power</i> yang tinggi yaitu <i>key players</i> ; Aktor dengan <i>interest</i> dan <i>power</i> yang tinggi yaitu <i>crowd</i> ; Aktor dengan <i>interest</i> rendah tetapi <i>power</i> yang tinggi yaitu <i>contest setters</i>		Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, USAID IUWASH PLUS, dan pemerintah desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Probolinggo membutuhkan koordinasi, sinergitas, dan komunikasi yang lancar.
3.	Maulida Rachmalia Dewi; Hikmah Dwi Nurfani; Anisa Nur Aisyah Borneo; Risnayanti Arung; 2020	Mengidentifikasi an dan memetakan <i>stakeholder</i> sesuai tingkat pengaruh dan kepentingan dalam pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara	Penelitian ini menggunakan teori identifikasi <i>stakeholder</i> menurut Maryono (2005), yang membagi <i>stakeholder</i> menjadi <i>stakeholder</i> primer, <i>stakeholder</i> kunci, <i>stakeholder</i> sekunder; teori pemetaan <i>stakeholder</i> berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh menurut Reed et al (2009); serta teori peran aktor menurut Riant Nugroho (2014)	Deskriptif Kualitatif	<i>Stakeholder</i> dalam pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi <i>stakeholder</i> primer, <i>stakeholder</i> kunci, serta <i>stakeholder</i> sekunder. <i>Stakeholder</i> yang menjadi kategori <i>subject</i> adalah Kelompok Tani dan Warga Kabupaten Kutai Kartanegara di 10 kecamatan yang memiliki potensi agropolitan. <i>Stakeholder</i> yang masuk pada <i>key players</i> yaitu Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara. <i>Stakeholder</i> kategori <i>crowd</i> yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas

					Perhubungan, PDAM Kabupaten Kartanegara, PT PLN UP3B Kalimantan Timur. <i>Stakeholder</i> kategori <i>contest setter</i> adalah pemerintah desa di 10 Kecamatan yang mempunyai potensi agropolitan. <i>Stakeholder</i> Primer berperan sebagai implementor; <i>Stakeholder</i> kunci berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan policy creator; <i>Stakeholder</i> Sekunder berperan sebagai fasilitator.
4.	Shinta Amelia; Ertien Rining Nawangsari; 2021	Menganalisis pelaksanaan program <i>urban farming</i> sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam masa pandemi covid-19 pada Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya.	Penelitian ini menggunakan teori model implementasi dari Van Meter dan Van Horn dalam menjelaskan pelaksanaan program <i>urban farming</i> di Kelurahan Jeruk, Kota Surabaya	Deskriptif Kualitatif	Program <i>urban farming</i> telah mempunyai tujuan kebijakan dan standar yang jelas; sumber daya manusia dan finansial telah berjalan dengan baik; indikator karakteristik badan pelaksana telah berjalan maksimal; kualitas hubungan interorganisasional belum optimal dalam hal komunikasi yang tepat, akurat serta konsisten; kondisi lingkungan politik, sosial dan ekonomi belum maksimal dalam hal lingkungan politik; serta disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana telah berjalan tetapi belum maksimal dalam pemahaman sebab beberapa masyarakat belum memahami dan mengerti pelaksanaan kegiatan <i>urban farming</i> .
5.	Kusnul Rohmania; Sri Juni Woro Astuti; 2022	Menjelaskan peranan dari aktor <i>penta helix</i> , serta	Penelitian ini menggunakan teori <i>penta helix</i> dari	Deskriptif Kualitatif	Peran aktor <i>penta helix</i> belum berjalan dengan baik dalam pengembangan



		faktor pendukung dan faktor penghambat peran aktor <i>penta helix</i> dalam pengembangan Wisata Taman Anggrek Semimi Ex Lokalisasi Moroseneng Kota Surabaya	Arief Yahya (2016). Teori Penta Helix mencakup unsur <i>academic, business, community, government, dan media</i> (ABCGM)		wisata taman aggrek. Pemerintah memiliki peran yang besar yang dimulai dari kegiatan perencanaan, penganggaran, pembangunan, hingga kegiatan promosi. Peran dari pihak akademisi dan swasta belum terlihat dalam pengembangan wisata taman aggrek. Media massa masih tidak terstruktur dalam mempublikasikan terkait wisata taman aggrek, dan aktor komunitas menjadi penghubung pemberdayaan masyarakat. Faktor pendukung yaitu dari pihak pemerintah yang perannya sebagai fasilitator dan inisator yang telah berjalan baik. Faktor penghambat adalah partisipasi masyarakat yang kurang, terbatasnya keterlibatan stakeholder, dan pandemi covid-19.
6.	Ali Jamil; 2022	Menganalisis peranan aktor dalam mengelola pupuk bersubsidi meliputi aktor pemerintah, pihak legislatif, serta lembaga pengawas atau perhimpunan	Penelitian ini menggunakan teori peran aktor dari Nugroho et al. (2014), yang mengelompokkan lima peran aktor yaitu pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan pupuk bersubsidi melibatkan tiga aktor yaitu aktor pemerintah, lembaga pengawas, serta organisasi yang terdampak kebijakan. Keterlibatan aktor dalam pengelolaan pupuk bersubsidi masih tergolong lemah dalam hal koordinasi atau koordinator, yang berdampak pada proses penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai asas ketepatan. Peningkatan koordinasi diantara aktor dalam pengelolaan pupuk bersubsidi dan

					penyempurnaan kebijakan subsidi pupuk perlu dilaksanakan untuk membentuk ketahanan pangan nasional.
7.	Yoga Aldi Saputra; Mochamad Chazienul Ulum; 2022	Menjelaskan dan menganalisis peran aktor yang terlibat dalam pemberdayaan petani kopi di Desa Muncar melalui model <i>penta helix</i> . Pemberdayaan ditinjau dari proses bertani budidaya, pasca panen, dan promosi panen.	Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dari Mardikanto dan Soebiato (2019:29), dan teori model <i>penta helix</i> (Slamet dkk, 2017)	Deskriptif Kualitatif	Aktor-aktor yang berkolaborasi dalam model <i>penta helix</i> dalam pemberdayaan petani kopi Desa Muncar yaitu aktor pemerintah melalui Pemerintah Desa Muncar, Pemerintah Kabupaten Temanggung, Dinperindagkop Kabupaten Temanggung, dan Dintanpangan Kabupaten Temanggung. Aktor swasta adalah PT. Astra International Tbk, kemudian aktor akademisi yaitu Universitas Sebelas Maret (UNS). Aktor komunitas atau NGO adalah KUB Karya Mulia dan Kelompok tani, serta aktor media yaitu Radio Temanggung. Pemberdayaan petani kopi Desa Muncar telah dapat merubah aktivitas petani dari budidaya, pasca panen, serta promosi kopi mengarah pada tatanan pemasaran yang lebih baik.
8.	Ainun Dwi Rahayu; Reza Nur Amrin; 2022	Mendeskripsikan dan memetakan <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo	Penelitian ini menggunakan teori identifikasi <i>stakeholders</i> menurut Townsley (1998), dan teori pemetaan <i>stakeholders</i> dari Reed et al (2009)	Deskriptif Kualitatif	Pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Wonosobo melibatkan 17 <i>stakeholders</i> yang dikelompokkan menjadi empat kuadran yaitu <i>Subject</i> , <i>Key Player</i> , <i>Crowd</i> , dan <i>Contest Setter</i> . <i>Stakeholders</i> yang terlibat dalam pengadaan tanah

					Bendungan Bener mempunyai peranan sebagai perencana, pembuat kebijakan ( <i>policy creator</i> ), perencana, koordinator, fasilitator, implementor, serta mediator. Kemampuan pemangku kepentingan untuk bekerjasama akan menentukan Keberhasilan pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Wonosobo.
9.	Shinta Wulandari; Tukiman; 2023	Menjelaskan pelaksanaan program pertanian perkotaan pada Kelompok Tani Elok Mekar Sari Kota Surabaya	Penelitian ini menggunakan teori model implementasi menurut van Meter van Horn, yang indikatornya adalah Ukuran dasar dan tujuan kebijakan, Sumber-sumber kebijakan, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, Karakteristik badan pelaksana, Keadaan ekonomi, politik, serta sosial	Deskriptif Kualitatif	Tujuan kebijakan dan kejelasan standar telah tercapai; sumber daya manusia dan finansial sudah dijalankan tetapi pada sumber daya manusia belum berjalan maksimal; komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, dan indikator karakteristik badan pelaksana telah dilakukan dengan baik; keadaan lingkungan politik, sosial dan ekonomi belum baik dalam hal lingkungan sosial; kecenderungan pelaksana telah berjalan tetapi memerlukan peningkatan pemahaman pelaksana terkait implementasi program pertanian perkotaan.
10.	Loetvy Wahyuningtiyas; Doddy Aditya Iskandar; 2023	Mengidentifikasi peran <i>stakeholder</i> yang ikut serta dalam pengembangan pengelolaan Kawasan Taman	Penelitian ini menggunakan teori dari Peran <i>Stakeholder</i> Nugroho et al., 2014; dan teori Peran <i>Stakeholder</i>	Deskriptif Kualitatif	Pembuat kebijakan dalam kawasan taman wisata alam Kawah Ijen mempunyai peran dalam menyusun kebijakan pengembangan Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Peran

		Wisata Alam Kawah Ijen	menurut Mustafa & Marsoyo, 2020		implementer, yang menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah terbentuk dalam pengelolaan kawasan wisata. Fasilitator yang mempunyai peran dalam menyediakan fasilitas pada <i>stakeholder</i> lain dalam melaksanakan kegiatan di kawasan wisata. Peran lainnya adalah aktor sebagai konservator yang bertugas melindungi lingkungan dan konservasi sumber daya alam di Kawasan Wisata Alam Kawah Ijen.
--	--	------------------------	---------------------------------	--	---

Sumber: Data Peneliti (2023)

Penelitian terdahulu digunakan untuk memberikan cara berpikir yang logis dalam penelitian. Pada penelitian digunakan beberapa referensi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian terdahulu mempunyai fokus melihat identifikasi *stakeholders* dari tiga kelompok *stakeholders* menurut Maryono (2005) yaitu *stakeholders* primer, *stakeholders* kunci, dan *stakeholders* sekunder. Fokus lainnya adalah pemetaan *stakeholders* berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan menurut Reed et al (2009), kemudian peran *stakeholders* menurut Nugroho (2014) yaitu pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, implementor, serta akselerator. Penelitian tersebut mempunyai lokus penelitian yang bervariasi dan bertujuan untuk mengetahui peran *stakeholders* dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran *stakeholders*. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu fokus dan lokus penelitian.

Perbedaan pada fokus yaitu penelitian ini menganalisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* yang melihat tugas dan fungsi *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan berdasarkan *stakeholders* pemerintah, bisnis, masyarakat, akademisi, dan media massa. Program *urban farming* yang sarannya mencakup masyarakat luas membutuhkan keterlibatan berbagai *stakeholders* dalam mewujudkan gerakan pembudayaan pertanian perkotaan. *Stakeholders* yang terlibat mempunyai peranannya masing-masing yang didalamnya mencakup hak dan kewajiban untuk mencapai sasaran pengelolaan *urban farming*.

Perbedaan pada lokus, yang mana penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sampangan Kota Semarang. Kota Semarang memiliki permasalahan mengenai menurunnya jumlah ketersediaan lahan pertanian. Penduduk Kota Semarang yang mengalami peningkatan setiap tahunnya akan berdampak juga pada kebutuhan pangan masyarakat yang meningkat, sedangkan pemenuhan kebutuhan pangan Kota Semarang sangat bergantung dengan wilayah-wilayah di sekitar Kota Semarang. Kelurahan Sampangan di Kota Semarang merupakan kawasan yang padat permukiman dan mempunyai potensi lahan pertanian yang kecil, sehingga perlu mengetahui peran *stakeholders* dalam mendukung pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan.

### **1.5.2 Administrasi Publik**

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014) merupakan suatu proses organisir dan koordinasi sumber daya dan personel publik dalam rangka

memformulasikan, melaksanakan, serta mengelola keputusan-keputusan pada kebijakan publik. Kedua ahli juga menerangkan lebih lanjut bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang bertujuan mengelola kebutuhan publik dan melakukan pekerjaan yang telah ditentukan. Administrasi publik sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai tujuan dalam mengentaskan masalah-masalah publik dengan perbaikan atau penyempurnaan khususnya pada bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Administrasi publik menurut pendapat Nicholas Henry dalam (Pasolong, 2008) yaitu sebuah kombinasi yang kompleks antara praktik dengan teori yang memiliki tujuan menyebarkan pemahaman kepada pemerintah dalam hubungan terhadap masyarakat yang diperintah, serta meningkatkan kebijakan publik yang tanggap pada kebutuhan sosial. Administrasi publik mengupayakan penerapan praktik-praktik manajemen supaya mencapai nilai efisiensi, efektivitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih baik.

Nicholas Henry dalam (Pasolong, 2008) menerangkan ruang lingkup administrasi publik, antara lain:

- a. Organisasi publik, terkait dengan perilaku birokrasi dan model-mode organisasi.
- b. Manajemen publik, menyangkut pembahasan ilmu dan sistem manajemen, produktivitas dan evaluasi program, anggaran publik, serta manajemen sumber daya manusia.

- c. Implementasi, mengenai pendekatan kebijakan publik dan implementasi, administrasi antar pemerintahan, privatisasi, serta etika birokrasi.

David H. Rosenblomm dalam (Indradi, 2006) mendefinisikan administrasi publik sebagai upaya memanfaatkan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, serta hukum dalam rangka memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif, untuk memberikan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan secara keseluruhan atau sebagian masyarakat. Berdasarkan definisi dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh lembaga atau sekelompok orang, yang melaksanakan sebuah kebijakan dengan mengembangkan praktek manajemen dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Nicholas Henry dalam (Keban, 2014) mengungkapkan lima paradigma administrasi publik yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Dalam buku Frank J Goodnow berjudul *Politics and Administration* (1900) terdapat dua pokok fungsi negara yaitu: pertama fungsi politik terkait dengan pembentukan kebijakan atau kehendak negara, dan kedua fungsi administrasi menyangkut pelaksanaan kebijakan negara. Penekanan paradigma ini yaitu lokus, tempat keberadaan dari administrasi publik. Ilmu Administrasi harus terpisah dari ilmu politik karena bidang ilmu administrasi berbeda dengan bidang ilmu politik. Pada buku Leoanrd D White dengan judul *Introduction to*

*Study of Public Administration* (1926) menyatakan bahwa politik tidak dapat mencampuri administrasi. Administrasi publik adalah ilmu yang dapat mengembangkan ilmunya dengan bebas (*value free*) dengan tujuan mencapai efisiensi dan ekonomi. Ilmu administrasi negara berfokus pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam birokrasi pemerintahan.

## 2) Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Paradigma ini ditandai dengan terbitnya buku *Principle of Public Administration* karya T.W Willoughby (1927). Pada buku tersebut menjelaskan prinsip-prinsip ilmiah dalam administrasi yang dapat digunakan oleh para administrator untuk menjalankan pekerjaannya. Prinsip-prinsip administrasi menjadi fokus administrasi publik, sedangkan lokus kurang ditekankan pada paradigma ini sebab terdapat pandangan bahwa prinsip administrasi publik berlaku pada seluruh tempat baik publik maupun privat yang tidak memandang perbedaan kultural. Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara universal pada semua tatanan, lingkungan sosial budaya, serta seluruh jenis organisasi. Gullick dan Urwick memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi yaitu POSDCORB (*planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, serta budgeting*).

## 3) Paradigma 3: Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1957)

Munculnya kritikan maupun pertentangan pada paradigma kedua menyebabkan administrasi publik kembali kepada induknya yaitu ilmu politik.



Paradigma ini sebagai sebuah usaha penetapan ulang jalinan konsep administrasi negara dengan ilmu politik. Administrasi publik dicirikan dengan tidak terdapatnya kerang kerja yang bersifat intelektual yang dipandang sebagai suatu penurunan spiral. Dalam paradigma ketiga juga terjadi pembaharuan lokus yaitu pada birokrasi pemerintah, namun implikasinya adalah melepaskan fokus sebagai bagian darinya. Administrasi publik lintas budaya terdapat perkembangan baru dari *Comparative Administration Group* (CAG) dengan tokoh utama Fred W. Riggs yaitu pendekatan komparatif memperlihatkan pendekatan baru dari administrasi publik dalam periode tersebut.

#### 4) Paradigma 4: Administrasi Negara Sebagai Administrasi (1956-1970)

Pada paradigma keempat, tokoh administrasi publik mencari alternatif lain untuk membuat administrasi publik sebagai suatu ilmu yang didasari karena ketidaksenangan ilmu administrasi yang dipandang ilmu kelas dua setelah ilmu politik. Alternatif pilihan manajemen merupakan opsi yang dapat diterapkan, namun manajemen hanya menyediakan sebuah fokus, tidak terdapat suatu lokus. Teknik-teknik yang disediakan dalam manajemen membutuhkan keahlian dan spesialisasi, tetapi tidak mengidentifikasi penerapan tempat kelembagaan atau keahlian. Menurut jurnal *Administrative Science Quarterly* mengungkapkan pada paradigma ini bahwa administrasi adalah administrasi yang berdasarkan suatu premis terkait perbedaan administrasi publik, privat, dan nonprofit merupakan hal yang tidak tepat. Persoalan dalam paradigma ini seperti pemilihan fokus tunggal yaitu ilmu administrasi apakah dapat membahas tentang publik atau negara, dan berbagai persoalan lainnya.

#### 5) Paradigma 5: Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik (1970)

Pada paradigma ini, administrasi publik mendapatkan pengakuan menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri. Munculnya paradigma ini dicirikan dengan pembentukan *The National Association of Schools of Public Affairs and Administration* (NASPAA) untuk mengembangkan studi administrasi publik dan mendorong kepercayaan studi tersebut. Administrasi publik sebagai suatu ilmu mempunyai fokus pada teori organisasi, ilmu manajemen, kebijakan publik, dan ekonomi politik, sedangkan lokusnya adalah permasalahan kepentingan publik. Pada paradigma ini, administrasi publik menemukan identitasnya. Administrasi publik tidak hanya terkait tatanan suatu birokrasi namun juga pelayanan publik melalui sebuah kebijakan dengan menerapkan teori *political-economy*.

#### 6) Paradigma 6: *Governance*

Paradigma terbaru administrasi publik yaitu *Governance* yang berarti suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan termasuk mengelola urusan yang berhubungan dengan politik, ekonomi, dan sosial. Pengelolaan pada paradigma ini dilakukan dengan interaksi tiga komponen, yaitu masyarakat (*civil society*), pemerintah atau negara (*state*), dan sektor bisnis (*private sector*). Pada paradigma keenam ini memberikan ruang bagi partisipasi sektor-sektor lain dalam pemerintahan karena keterbatasan kapasitas sumber daya pemerintah, sehingga pemerintah bukan menjadi aktor tunggal dalam pengelolaan pemerintahan. Masyarakat dan sektor lainnya dapat memaknai kepentingannya,

memediasi perbedaan-perbedaan, serta melaksanakan hak dan kewajiban. Paradigma ini menekankan penguatan interaksi antara ketiga aktor tersebut dalam memperkenalkan *people-centered development*.

Penelitian ini menggunakan paradigma keenam atau paradigma *governance*. Pada paradigma *governance* terdapat interaksi keterlibatan berbagai *stakeholders*, baik pada *stakeholders* pemerintah dan *stakeholders* non pemerintah yaitu bisnis, komunitas atau masyarakat, akademisi, dan media massa. Paradigma yang digunakan merupakan paradigma *governance* sebab untuk menganalisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming*. Peran *stakeholders* sebagai integrasi hubungan antar *stakeholders* yang terlibat, baik pemerintah dengan komunitas, bisnis, akademisi, maupun media massa.

### **1.5.3 Manajemen Publik**

Manajemen menurut G.R Terry dalam (Hasibuan, 2009) adalah proses yang khas terdiri dari kegiatan perencanaan, pengarahan serta pengendalian dalam rangka penentuan dan pencapaian target melalui penggunaan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Menurut Handoko (2009:23) sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan pekerjaan para anggota organisasi dan pemanfaatan sumber daya organisasi lainnya dalam rangka mencapai organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen Publik menurut Overman dalam Keban (2008) manajemen publik merupakan studi interdisipliner dari unsur-unsur umum organisasi, dan sebagai kesatuan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan

*controlling*, dengan SDM, keuangan, fisik, dan politik. Manajemen Publik menurut Lauranece Lynn dalam Wijaya (2014) merupakan seni terkait aktivitas kreatif para praktisi, ilmu terkait dengan analisis mendalam dengan interpretasi serta eksplanasi, serta profesi yang terkait dengan kelompok orang yang berkontribusikan dirinya dalam manajemen publik.

Manajemen publik menurut Ott, Hyde, dan Shafritz dalam Wijaya (2014) adalah cabang administrasi publik yang fokus utamanya menerangkan berhubungan desain, program, dan restrukturisasi organisasi, alokasi sumber daya dengan sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, serta evaluasi program dan audit. Berdasarkan definisi para ahli di atas diketahui bahwa manajemen publik merupakan bidang studi pada unsur-unsur umum organisasi yang berhubungan dengan upaya merencanakan, mengorganisasikan, dan pengawasan. Inti dalam manajemen publik adalah pelayanan publik. Manajemen publik berhubungan dengan pemerintah karena pemerintah yang mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

Prinsip-prinsip berhubungan dengan manajemen publik menurut Wilson dalam (Keban, 2014) antara lain:

1. Pemerintah merupakan setting utama organisasi
2. Fungsi eksekutif sebagai fokus utama
3. Prinsip-prinsip dan teknik manajemen lebih efektif dicari sebagai kunci mengembangkan kompetensi administrasi

4. Metode perbandingan merupakan metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik

Prinsip-prinsip manajemen publik yang diungkapkan oleh Wilson memiliki pengaruh terhadap perkembangan manajemen publik, yang menyebabkan terdapatnya pergeseran pada paradigma manajemen publik sejalan dengan perkembangan administrasi publik. Perkembangan paradigma manajemen publik dijelaskan sebagai berikut:

1. Paradigma Pertama

Paradigma pertama manajemen publik menekankan terdapat pengembangan sistem rekrutmen pegawai yang perlu dilakukan oleh unsur pemerintah yang termasuk didalamnya ujian pegawai negeri, klasifikasi jabatan, promosi, dan pensiun secara lebih baik, kemudian juga berhubungan dengan upaya mengembangkan sumber daya yaitu sumber daya manusia dan sumber daya material agar diupayakan dapat menjadi lebih akuntabel dalam rangka mencapai tujuan negara.

2. Paradigma Kedua

Paradigma kedua terdapat prinsip perencanaan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), mengatur staf (*staffing*), mengarahkan (*directing*), mengkoordinasikan (*coordinating*), melaporkan (*reporting*), dan anggaran (*budgeting*) atau disingkat menjadi prinsip POSDCROB. Prinsip tersebut dipandang menjadi prinsip yang umum dan fleksibel.

### 3. Paradigma Ketiga

Paradigma ketiga muncul karena terdapat kritik-kritik pada masa paradigma sebelumnya yang menganggap bahwa fungsi manajemen tidak perlu dipelajari secara normatif sebab hanya akan membuat manajemen publik dilihat sebagai politik sesuai yang terjadi pada administrasi publik.

### 4. Paradigma Keempat

Paradigma keempat konsep manajemen lebih dikembangkan dilihat dari adanya sekolah-sekolah yang secara khusus mempelajari administrasi publik dan manajemen publik. Pada paradigma keempat pula dikenal fungsi manajemen yaitu human relations, komunikasi, perilaku organisasi dan sebagainya.

### 5. Paradigma Kelima

Paradigma kelima mencirikan manajemen publik yang semakin berkembang hingga saat ini.

Manajemen publik yang terdapat dalam pengelolaan *urban farming* digunakan untuk melihat peran yang dilakukan oleh stakeholders mencakup pemerintah, bisnis, masyarakat, akademisi, dan media massa untuk menjalankan *urban farming*.

#### 1.5.4 Teori Peran

Teori peran menurut pendapat Robert Linton dalam (Musadadd, 2018) merupakan interaksi dalam lingkup sosial pada terminologi *stakeholders* yang bertindak menurut budaya yang telah ada. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa individu mempunyai suatu peran supaya dapat menunjukkan tindakan atau perilaku berdasarkan peranannya yang sesuai dengan hak dan kewajiban. Peran menurut Soekanto (2002) dalam adalah aspek dinamis status atau kedudukan, jika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, sehingga ia melaksanakan peranan. Berdasarkan pendapat dari Cohen (2009) mengungkapkan bahwa peran sebagai perilaku yang dituntut untuk dilaksanakan oleh pihak lain untuk seseorang yang mempunyai sebuah kedudukan tertentu. Berdasarkan pengertian peran para ahli diatas dapat didefinisikan bahwa peran adalah seperangkat tindakan yaitu hak dan kewajiban menurut kedudukannya di masyarakat. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang.

Biddle dan Thomas (1966) membedakan peran menjadi empat golongan, yaitu pada istilah-istilah yang berkaitan:

- a) Orang yang menjadi bagian pada interaksi sosial, dibedakan menjadi dua golongan yaitu *stakeholder* (pelaku) dan target (sasaran) atau orang lain (others);
- b) Perilaku yang terjadi dalam interaksi tersebut;

- c) Kedudukan orang-orang dalam perilaku, yang dikelompokkan menjadi *stakeholder* utama atau primer dan *stakeholder* pendukung atau sekunder.
- d) Kaitan antara orang dengan perilaku

Teori peran menurut Jim Ife (2008) terdapat beberapa indikator peran yang perlu dimiliki oleh individu atau kelompok agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran tersebut antara lain:

#### 1. Peran fasilitatif

Peran dalam memberikan fasilitasi, menguatkan, serta mengapresiasi kontribusi atau kerja yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau masyarakat. Membentuk kesepakatan dengan pihak tertentu untuk mengembangkan potensi individu, kelompok, dan masyarakat.

#### 2. Peran Edukasi

Peran dalam memberikan masukan untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, dan pengalaman untuk individu, kelompok, serta masyarakat. Peran ini berkaitan dengan pembelajaran kepada masyarakat yang dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan, informasi, masukan terkait dengan *urban farming*.

#### 3. Peran Representasional

Peran dengan melakukan interaksi dengan pihak luar demi kepentingan individu, kelompok, serta masyarakat. Peran ini dilaksanakan dengan memperoleh sumber-sumber dari luar namun dengan pertimbangan yang



matang, Melakukan advokasi untuk membela kepentingan masyarakat, Memanfaatkan media masa untuk memperkenalkan hasil produksi. Peran lainnya dengan menerima dukungan pihak luar secara luas, membuka jaringan kerja, mengembangkan hubungan berbagai pihak, serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan potensi.

#### 4. Peran Teknis

Peran berkaitan dengan kemampuan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti peran pengumpulan dan analisis data, kemampuan dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pembinaan, kemampuan teknis dalam melaksanakan proses *urban farming*.

### 1.5.5 Peran *Stakeholders*

*Stakeholders* Menurut Freedman (dalam Oktavia & Saharuddin, 2015) adalah individu atau kelompok yang dapat memberikan pengaruh ataupun dipengaruhi oleh pencapaian sasaran dari program tertentu. *Stakeholders* menurut Hetifah (2003) merupakan individu, kelompok ataupun organisasi yang mempunyai kepentingan tertentu, terlibat, dipengaruhi baik pengaruh secara positif atau negatif dalam program pembangunan.

Menurut pendapat Buse (2012) *stakeholder* merupakan individu atau kelompok yang mempunyai maksud atau kepentingan substantif dalam sebuah permasalahan, yang didalamnya mencakup mereka yang mempunyai peran untuk pengambilan keputusan atau melaksanakannya.

Masalah publik yang semakin kompleks memerlukan campur tangan berbagai *stakeholders* dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing untuk memperoleh tujuan bersama sehingga memunculkan ketergantungan antar *stakeholders*. *Stakeholders* mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga tidak hanya fokus pada kepentingan salah satu *stakeholders* melainkan setiap *stakeholders* yang terlibat. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat didefinisikan bahwa *stakeholders* merupakan sekelompok individu atau orang yang saling memberikan pengaruh, mempunyai peran, dan memiliki ketergantungan satu sama lain agar mencapai tujuan bersama untuk memenuhi kepentingan *stakeholders*.

Peran masing-masing *stakeholders* dalam menjalankan tugas dan fungsi menurut Riant Nugroho (2014) mengelompokkan *stakeholders* berdasarkan peranannya, antara lain:

- 1) *Policy Creator*

Peran *policy creator* merupakan peran dalam mengambil sebuah keputusan, dan menentukan sebuah kebijakan atau program. Peran pembuat kebijakan menurut Sirojudin dalam (Febrianti Eni, 2022) perlu mempunyai konsep atau dasar antara lain mengidentifikasi fenomena dan masalah (intelegensia), mempunyai desain dan analisis alternatif masalah, serta mampu memilih alternatif paling baik diantara alternatif-alternatif lainnya dari suatu masalah.

## 2) Koordinator

Peran koordinator merupakan peran untuk mengkoordinasikan antara *stakeholder* satu dengan *stakeholder* lain yang terlibat dalam sebuah kebijakan. Aktivitas berkoordinasi atau mengkoordinasikan antar *stakeholder* berarti mengarahkan, mengintegrasikan unsur pengelolaan serta pekerjaan. Mengkoordinasikan menurut Crowston (1997) sejalan dengan pemikiran Nugroho (2014) yaitu mengintegrasikan atau menghubungkan bagian-bagian yang saling terkait saat melaksanakan kerjasama dalam pencapaian tujuan. Kegiatan koordinasi dapat dilaksanakan secara vertikal maupun horizontal. Koordinasi secara vertikal merupakan koordinasi yang dilakukan antar koordinator memiliki hubungan hierarkis dengan struktural, atau dilakukan oleh atasan kepada satuan bidang kerja yang terdapat dibawah wewenang dan tanggungjawabnya. Koordinasi secara horizontal berarti koordinasi yang terjadi dimana memiliki posisi yang sama atau sejajar dengan koordinator yang dikoordinasikan.

## 3) Fasilitator

Peran fasilitator adalah individu atau kelompok yang berperan untuk memberikan fasilitasi dan memenuhi apa yang dibutuhkan dari kelompok sasaran pada program tersebut. Fasilitator menurut Jumrana dan Tawulo (2015) sejalan dengan pendapat Nugroho (2014) yang menerangkan bahwa fasilitator mempunyai tugas utama antara lain: Menerapkan aturan main pada daerah dampingan; Melaksanakan kegiatan berdasarkan prosedur yang

telah ditetapkan oleh petunjuk teknis; dan Menangani masalah, pelatihan, serta penguatan kelompok.

#### 4) Implementor

Peran implementor adalah individu atau kelompok yang mempunyai peran melaksanakan kebijakan atau program, yang didalamnya juga mencakup kelompok sasaran. Implementor menurut Dolly dalam (Eni, 2022) sesuai dengan pendapat Nugroho (2014) sebagai individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang menjalankan kebijakan atau melakukan tindakan-tindakan yang telah ditetapkan dalam pencapaian suatu tujuan.

#### 5) Akselerator

Peran akselerator merupakan individu atau kelompok yang mempunyai peran untuk mempercepat dan berkontribusi supaya sebuah kebijakan atau program dapat terlaksana sesuai tujuan yang telah ditetapkan, atau bahkan tujuan dapat tercapai lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Seorang akselerator suatu program menurut Nugroho (2014) diharapkan dapat memberikan sumbangan ide, gagasan, serta inovasi dalam pelaksanaan program. Akselerator mempunyai tugas utama yaitu mendukung dan mempercepat pelaksanaan program atau kegiatan sesuai dengan tujuan program, seperti memberikan dana tambahan atau sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan pelaksanaan sebuah program atau kegiatan.

### **1.5.6 Urban Farming**

*Urban farming* atau pertanian perkotaan adalah kegiatan yang dilaksanakan pada dalam kota (*urban*) dan pinggiran kota (*semi urban*) untuk produksi, pemeliharaan, pengolahan, dan pendistribusian berbagai produk pertanian, menggunakan sumber daya manusia, material, produk serta jasa di wilayah perkotaan (Smith, 1996).

Menurut pendapat Annisya, N.W. (2015) *urban farming* yaitu kegiatan pertanian di dalam atau sekitar kota dengan melibatkan keterampilan, keahlian, dan inovasi pada budaya pengolahan makanan untuk masyarakat melalui penggunaan pekarangan rumah, lahan kosong dalam rangka meningkatkan gizi dan kemandirian pangan, ekonomi, serta kesejahteraan keluarga. *Urban farming* menurut Setiawan dan Rahmi (2004) *urban farming* adalah suatu upaya baik komersial ataupun tidak, yang berhubungan pada produksi, distribusi, dan konsumsi dari hasil pertanian yang dilaksanakan di wilayah perkotaan.

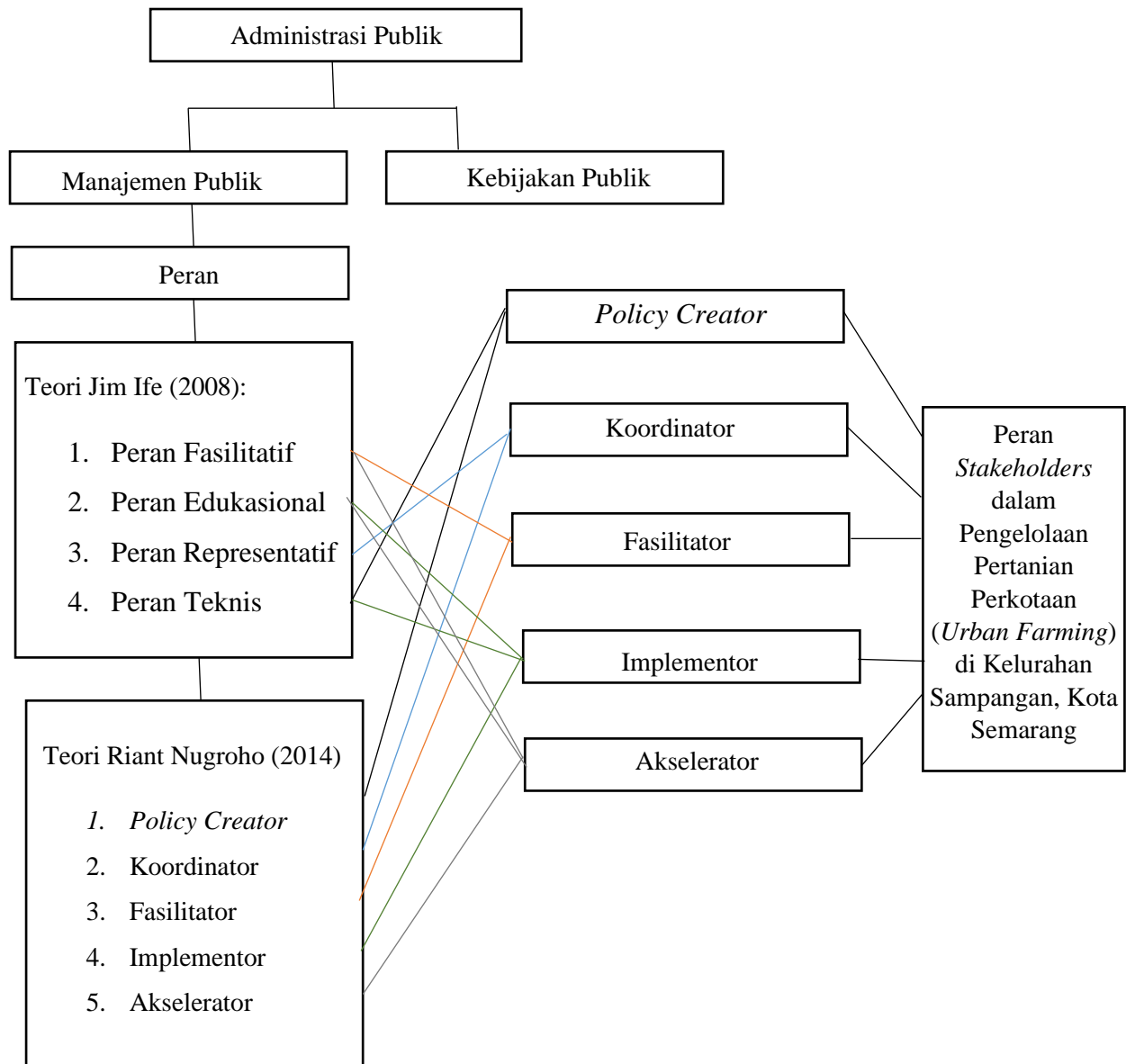
Posisi pertanian perkotaan menurut FAO (2003) antara lain: (1) salah satu sumber pasokan pangan dan strategi ketahanan pangan rumah tangga perkotaan; (2) aktivitas produktif dalam pemanfaatan ruang terbuka dan limbah perkotaan (3) sumber penghasilan dan peluang kerja masyarakat kota. Praktik budidaya tanaman sayuran yang dilaksanakan di perkotaan sebagai bentuk ide bidang pertanian dalam rangka mengoptimalkan fungsi lahan yang terbatas dan tidak produktif serta pemanfaatan sumber daya lain di sekitarnya (Ras, 2013). Kehadiran pertanian perkotaan sebagai solusi keterbatasan lahan pertanian, dengan praktek

pembudidayaan pertanian yang memanfaatkan lahan tidak produktif atau lahan yang tidak harus berskala luas karena terdapat beberapa teknologi sederhana seperti vertikultur dan tabulampot yang dapat dilakukan dimana saja oleh siapa saja dengan biaya terjangkau.

Pertanian perkotaan dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori menurut menurut Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang (2016), yaitu:

- 1) Tipe A: Perkebunan dengan penanaman tanaman pada wadah, polybag, atau pot daur ulang di lahan yang kosong, termasuk pekarangan rumah.
- 2) Tipe B: Tanaman produktif di pekarangan rumah (satu rumah satu pohon). Tanaman ditanam pada tipe sebagian besar adalah tanaman tahunan.
- 3) Tipe C: Tipe dengan sayuran atau tanaman hias pada pekarangan rumah yang penanamannya langsung di tanah melalui bedengan.
- 4) Tipe D: Tipe vertikultur atau tanaman pada dinding. Tipe ini sebagian besar memanfaatkan wadah dari botol plastik bekas yang ditimpelkan pada dinding. Tanaman yang ditanam biasanya adalah tanaman sayuran yang cepat tumbuh dan panen, seperti kangkung dan sawi.
- 5) Tipe E: Tanaman yang merambat pada pagar atau tembok rumah. Tanaman pada tipe ini menggunakan tanaman khusus bersifat merambat.

## 1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis



**Grand Theory**

**Middle Range Theory**

**Empirical Theory**

## 1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena keingintahuan penulis terkait peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang. Pembudayaan *urban farming* melihat terbatasnya lahan pertanian di Kota Semarang yang hanya memenuhi 11% kebutuhan pangan masyarakat Kota Semarang dari jumlah produksi total pertanian, sehingga pemenuhan pangan di Kota Semarang masih bergantung pada wilayah di sekitar Kota Semarang seperti Ungaran, Kendal, Demak, dan Grobogan.

Pengelolaan *urban farming* membutuhkan keterlibatan dengan berbagai *stakeholders*. Keterlibatan berbagai *stakeholders* tersebut akan menciptakan peranan setiap *stakeholders*. Setiap *stakeholders* mempunyai kepentingan dan perannya masing-masing dalam suatu hubungan, sehingga mempengaruhi pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang. *Stakeholders* yang menjalankan peranannya dengan maksimal tersebut dapat membantu dalam meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan.

Kurang optimalnya peran masing-masing *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan *urban farming* menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Peran *stakeholders* tersebut yang mencakup *stakeholder* pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas (NGO), dan media massa. Setiap *stakeholders* mempunyai tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian tujuan pengelolaan *urban farming*. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tugas dan fungsi *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan *urban farming*, peran setiap *stakeholders* dalam pengelolaan *urban*



*farming*, serta faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang.

### **1.8 Operasionalisasi Konsep**

Operasionalisasi sebagai upaya memudahkan pengukuran variabel dari konsep yang masih bersifat abstrak, dan memberikan landasan pada kegiatan penelitian. Fungsi operasionalisasi konsep juga memberikan batasan bagi peneliti supaya tetap sesuai pada jalur yang telah direncanakan dalam penelitian. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hal-hal yang akan digali lebih mendalam oleh peneliti dalam memaparkan permasalahan-permasalahan di lapangan sebagai objek penelitian. Secara umum, *stakeholders* dalam pelaksanaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan meliputi unsur pemerintah, bisnis, komunitas, dan media massa. Fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini.

- 1) Pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan mendorong kompleksitas masalah pada peran *stakeholders*. Fenomena tersebut membutuhkan telaah tugas dan fungsi setiap *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang.
- 2) Peran masing-masing *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang. Lima kategori peran *stakeholders* meliputi:

1. *Policy Creator*

Kriteria yang diamati pada tahap ini yaitu:

- Memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan
  - Merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan
2. Koordinator,

Kriteria yang diamati pada tahap ini antara lain:

- Mengkoordinasikan *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan *urban farming*
- Mengarahkan alur pelaksanaan kegiatan *urban farming*

3. Fasilitator,

Kriteria yang diamati pada tahap ini antara lain:

- Menyediakan fasilitas pengelolaan *urban farming*
- Memenuhi kebutuhan kelompok sasaran dalam pengelolaan *urban farming*

4. Implementor,

Kriteria yang diamati pada tahap ini antara lain:

- Melaksanakan *urban farming*
- Melakukan pengawasan pelaksanaan *urban farming*
- Memiliki pengetahuan terkait pelaksanaan *urban farming*

5. Akselerator

Kriteria yang diamati pada tahap ini antara lain:

- Mempercepat pencapaian sasaran pengelolaan *urban farming*
- Memberikan ide atau inovasi dalam pengelolaan *urban farming*

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif sebagai penelitian dengan menggambarkan, membuat sebuah catatan, melakukan analisa, dan menginterpretasikan ke dalam situasi saat ini untuk memberikan gambaran mekanisme suatu proses dan membentuk serangkaian pola atau kategori. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013) adalah metode penelitian untuk meneliti keadaan obyek yang alamiah dengan peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilaksanakan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif memfokuskan makna daripada generalisasi.

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengamati situasi di tempat penelitian, serta berinteraksi langsung dengan sumber data, sehingga setiap fenomena tidak luput dari jangkauan peneliti. Penelitian ini termasuk pada penulisan sosial yang penulis terjun langsung dan berinteraksi langsung di lapangan dengan para *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan tempat atau lokasi peneliti melaksanakan penelitian. Penelitian ini memiliki lokus di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian karena Kelurahan Sampangan

merupakan kawasan yang padat permukiman penduduk, yang ditinjau dari segi geografis Kelurahan Sampangan tidak memiliki potensi lahan untuk kegiatan pertanian secara konvensional. Keterbatasan lahan pertanian tersebut maka upaya mengoptimalkan sektor pertanian di Kelurahan Sampangan dengan mengembangkan pertanian perkotaan atau *urban farming* sebagai aktivitas pembudayaan pertanian dengan memanfaatkan lahan tidur atau lahan yang tidak produktif dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.

Pada RW 03 Kelurahan Sampangan telah ditetapkan sebagai Kampung Hebat Kategori Kampung Urban Farming di Kota Semarang tahun 2023, dan di Kelurahan Sampangan merupakan *urban farming champion* tingkat kelurahan se-Kota Semarang. Pada pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan yang melibatkan berbagai *stakeholders* terdiri dari *stakeholders* pemerintah, bisnis, komunitas, akademisi, dan media massa, namun peranan *stakeholders* masih mengalami permasalahan dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian sebagai seseorang ataupun sekelompok orang yang akan dimintai keterangan, berkaitan dengan sebuah fakta ataupun pendapat tentang permasalahan yang diteliti. Pemilihan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan sumber data, seperti pertimbangan terkait tingkat pemahaman terhadap penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini juga dikelompokkan berdasarkan konsep *pentahelix* menurut Arief Yahya (2016) yang

terdiri dari: Pemerintah (*Governement*) yang mencakup Dinas Pertanian Kota Semarang, Pemerintah Kelurahan Sampangan; Bisnis (*Business*) adalah PT. BRI Regional Office Kota Semarang; Masyarakat (*Community*) yang mencakup Kelompok Wanita Tani (KWT) Puspitasari, PKK RW 03 Kelurahan Sampangan, RW 03 Kelurahan Sampangan; Akademisi (*Academy*) adalah Universitas Negeri Semarang; Media Massa (*Mass Media*) adalah Jawapos Radar Semarang.

Subjek penelitian ditentukan peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Teknik *snowball sampling* sebagai teknik pemilihan sampel rujukan berantai atau bola salju, artinya informan lain dipilih menurut informasi dan rekomendasi dari narasumber sebelumnya yang memiliki potensi mengetahui dan mempunyai pengetahuan pada masalah penelitian (Mack, 2005). Teknik *purposive sampling* sebagai teknik pemilihan sampel yang telah ditentukan secara sadar berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian tujuan penelitian.

**Informan Penelitian Menggunakan Teknik *Purposive Sampling*:**

- Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang
- Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Gajahmungkur
- Lurah Kantor Kelurahan Sampangan
- Ketua KWT Puspitasari
- Ketua RW 03 Kelurahan Sampangan

**Informan Penelitian Menggunakan Teknik *Snowball Sampling*:**

- Pengurus PKK RW 03 Kelurahan Sampangan
- Dosen Universitas Negeri Semarang Program Studi Pendidikan Geografi
- Bagian umum dan kerja sama PT. Bank Rakyat Indonesia Regional Office Semarang
- Wartawan Jawapos Radar Semarang

#### 1.9.4 Jenis Data

Data kualitatif sebagai jenis data yang disajikan dalam bentuk verbal (kata atau yang digunakan untuk menyusun secara kategoris berdasarkan atribut dan sifat dari fenomena yang diteliti, yang terdiri dari seperangkat teks atau informasi terkait penelitian. Jenis data yang akan digunakan peneliti antara lain:

a. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan setiap orang yang diwawancara dan diamati sebagai sumber utama informasi penelitian. Sumber data utama penelitian melalui wawancara dan pengamatan direkam dalam bentuk tertulis dan direkam menggunakan alat rekaman yaitu telepon seluler dan kamera video, yang hasilnya berbentuk rekaman suara, foto, dan video. Peneliti dalam penelitian ini melakukan kajian terhadap peran pemangku kepentingan untuk mengetahui gejala yang terjadi dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang.

b. Sumber Tertulis

Sumber tertulis digunakan oleh penulis untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan data penelitian. Sumber tertulis penelitian ini didapatkan dari buku, jurnal ilmiah, artikel online mengenai program *urban farming* di Kota Semarang, dokumen resmi diperoleh dari Dinas Pertanian Kota Semarang tentang pengelolaan *urban farming* dan Pemerintah Kelurahan Sampangan, dokumen pribadi Kelompok Wanita Tani Puspitasari Kelurahan Sampangan.

c. Foto

Foto dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu foto yang didapatkan dari hasil pemotretan oleh peneliti, dan hasil foto yang diperoleh dari orang lain terkait pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan. Foto yang didapatkan saat penelitian dapat menjadi sumber data deskriptif dengan menjelaskan keadaan atau situasi pada foto yang berhubungan dengan fokus penelitian.

d. Data Statistik

Data statistik digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memberikan tambahan data penelitian. Peneliti menggunakan data statistik pada penelitian ini untuk mendukung dan melakukan analisis yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kota Semarang dan Pemerintah Kelurahan Sampangan.

### **1.9.5 Sumber Data**

Sumber data merupakan seluruh keterangan yang didapatkan dari responden ataupun berasal dari dokumen baik dokumen dalam bentuk statistik atau bentuk lainnya untuk kepentingan penelitian tersebut (Subagyo, 2006). Penelitian ini memperoleh data dari:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitiannya atau berasal pada sumber pertama tanpa perantara sumber lain.

Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari jawaban setiap pertanyaan yang disampaikan peneliti kepada informan melalui wawancara atau observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan tidak dari sumber pertama atau berdasarkan analisis dokumen yang telah tersedia. Data sekunder digunakan untuk memperkuat maupun melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan tahunan, laporan hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi instansi terkait yaitu Dinas Pertanian Kota Semarang, dan Pemerintah Kelurahan Sampangan.

### **1.9.6 Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data sebagai langkah strategis sebab tujuan utama penelitian yaitu mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1) Wawancara

Wawancara menurut Moleong (1993) merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara sebagai percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban berhubungan pertanyaan tersebut. Wawancara sebagai metode pengambilan data melalui pertukaran informasi dan ide dengan tanya jawab antara peneliti dengan subyek atau narasumber terkait topik penelitian.



Peneliti memilih wawancara mendalam supaya narasumber dapat memberikan informasi atau data secara lengkap dan jelas tentang peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang. Pada pelaksanaan wawancara, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin sebagai teknik memberikan pertanyaan bebas untuk narasumber atau menggunakan *interview guide* (pedoman wawancara), yang berisi pertanyaan-pertanyaan pokok yang telah diarahkan pada masalah penelitian. Cara tersebut digunakan peneliti agar memberikan ruang variasi jawaban oleh informan dan memperoleh informasi atau data lebih mendalam.

## 2) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati secara langsung gejala-gejala yang berhubungan dengan permasalahan di lapangan dalam rangka memperoleh keterangan mengenai objek penelitian. Jenis observasi menurut Nugrahani (2014) dibedakan menjadi empat antara lain observasi berperan serta secara lengkap; observasi pemeran serta sebagai pengamat; observasi pengamat sebagai pemeran serta; dan observasi pengamat penuh.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis observasi pengamat sebagai pemeran, sebab peneliti tidak ikut serta dalam pengelolaan tersebut yang hanya datang mengamati secara langsung kegiatan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang, tetapi keberadaan peneliti diketahui oleh umum. Observasi pada penelitian ini mengamati tentang peran

*stakeholders*, serta faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholders* dalam pengelolaan *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang.

### 3) Studi Dokumen

Dokumentasi sebagai metode pengkajian pada dokumen terkait penelitian, sehingga menyempurnakan data yang telah didapatkan melalui metode observasi dan wawancara. Penelitian menggunakan dokumentasi dengan mencari data tentang informasi terkait penelitian melalui buku, surat kabar, artikel, peraturan-peraturan tentang pertanian dan *urban farming*, laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Pertanian Kota Semarang, dokumen resmi tentang program *urban farming* yang didapatkan dari Dinas Pertanian Kota Semarang dan Pemerintah Kelurahan Sampangan.

#### **1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data Kualitatif adalah suatu metode yang digunakan dalam memproses sekumpulan data guna mendapatkan informasi yang jelas. Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2018) analisis data kualitatif dilakukan melalui pengolahan data, mengorganisasikan data, melakukan pemilahan dalam unit-unit yang dapat dikelola, melaksanakan pensintesisan, mendapatkan serta mencari pola, memilih hal-hal penting yang perlu dipahami dan menetapkan apa yang dapat diceritakan kepada orang-orang.

Menurut Miles dan Huberman (2014) mengungkapkan bahwa kegiatan analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan dilakukan

dengan berulang-ulang hingga tuntas sehingga data dapat dianalisis. Tahapan dalam analisis data antara lain:

#### 1) Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dilaksanakan dengan mengumpulkan hasil wawancara, observasi, dokumen-dokumen berkaitan dengan masalah yang ditemukan di lapangan kemudian data dikembangkan melalui tahap berikutnya atau tahap kondensasi data.

#### 2) Kondensasi Data

Kondensasi data menurut Miles dan Huberman (2014) menuju kepada suatu proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan mentransformasikan data yang diperoleh dalam catatan di lapangan atau transkrip suatu penelitian yang dijabarkan antara lain:

- a. Pemilihan. Pada proses pemilihan data dengan menentukan bagian-bagian pokok atau penting sehingga peneliti harus bertindak selektif. Hubungan yang memiliki kemungkinan makna dan informasi selanjutnya dikumpulkan dan dianalisis.
- b. Pengerucutan. Pada tahapan pengerucutan dengan memfokuskan data yang mempunyai hubungan dengan masalah penelitian. Tahap ini merupakan keberlanjutan pada tahap seleksi data, yang mana data dalam penelitian harus dibatasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

c. Peringkasan. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan seleksi terutama yang berkaitan kualitas data dan cakupan data.

d. Penyederhanaan dan transformasi, menyederhanakan data yang didapatkan pada penelitian kemudian ditransformasikan melalui seleksi yang ketat dengan ringkasan, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas.

### 3) Penyajian Data

Penyajian data bermanfaat untuk menyederhanakan data dan informasi yang bersifat umum sehingga mudah untuk dipahami. Peneliti menyajikan data berdasarkan hasil temuan yang didapatkan di lapangan, kemudian merencanakan kerja selanjutnya.

### 4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan usaha dalam mencari dan memahami alur sebab akibat, keteraturan atau pola, serta maksud dari data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan juga sebagai gambaran objek yang masih belum jelas sebelumnya kemudian setelah diteliti menjadi jelas. Penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan cara menganalisis dan mengecek kembali dengan bukti yang didapatkan pada penelitian di lapangan.

## **1.9.8 Kualitas Data**

Penelitian kualitatif harus mempunyai reputasi dan standar legalitas yang baik untuk memberikan penelitian kualitatif dengan kredibilitas tinggi sesuai

fakta di lapangan. Teknik pemeriksaan keabsahan data menurut Sugiyono (2015) berarti derajat kepercayaan atas data penelitian yang didapatkan dan kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan. Empat teknik untuk mengetahui kualitas data menurut Lincoln dan Guba dalam (Subadi, 2006) yaitu *credibility* (kredibilitas), *transferability* (transferabilitas), *dependability* (dependabilitas), *confirmability* (konfirmasiabilitas). Peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji kualitas data penelitian. Teknik uji kredibilitas yang digunakan pada penelitian ini memakai teknik triangulasi.

Menurut pendapat Sugiyono (2015), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui penggabungan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Tujuan teknik triangulasi agar memperoleh data yang bernilai konsisten, tuntas, dan akurat, dengan melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data penelitian. Menurut Sugiyono (2015) triangulasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Triangulasi Sumber merupakan pengujian kredibilitas suatu data dilaksanakan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang didapatkan dari berbagai sumber data menggunakan teknik yang sama.
2. Triangulasi Teknik adalah pengujian kredibilitas data yang dilaksanakan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah didapatkan dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu sebagai pengujian kredibilitas pada waktu atau keadaan yang berbeda hingga memperoleh data yang kredibel.

4. Triangulasi teoritis sebagai penggunaan lebih dari satu sudut pandang teoritis dalam pemeriksaan data ketika membahas masalah yang diteliti (Moleong, 2005).

Teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan suatu cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan data yang telah didapatkan dari beberapa sumber yang berbeda-beda menggunakan teknik yang sama. Triangulasi sumber artinya peneliti mewawancarai orang yang berbeda yang masih sesuai kriteria informan, sehingga tidak hanya mencari informasi dengan wawancara satu informan saja, kemudian memastikan validitas atau kebenaran data melalui analisis data hasil wawancara dengan kondisi di lapangan dan dokumentasi.

Triangulasi sumber dilakukan dengan pengecekan ulang informasi yang didapatkan dari wawancara dan observasi untuk mengetahui kevalidan data. Triangulasi sumber data penelitian dilaksanakan dengan melakukan perbandingan antara data hasil wawancara dan hasil pengamatan, serta membandingkan antara hasil wawancara dan isi dokumen terkait.